
Paradigma Pendidikan IPS

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang paradigma pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) serta untuk memudahkan Anda dalam memahami materi tersebut, penulis ingin mengajak Anda untuk mendapatkan penjelasan tentang (1) perkembangan masyarakat Indonesia, dan (2) orientasi studi sosial dan Pendidikan IPS. Pemahaman tentang kedua hal tersebut sangat penting bagi kita untuk memberikan dasar pemahaman tentang apa dan mengapa reorientasi pendidikan IPS di Indonesia. Pemahaman tentang perkembangan masyarakat Indonesia di masa lalu diharapkan dapat memberi landasan kontekstual tentang pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pada bagian ini akan bersama-sama menyimak hal-hal yang terkait dengan interaksi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan kehidupan global. Di samping itu, manfaat lain yang dapat kita peroleh adalah kita akan memiliki gambaran tentang gerakan demokratisasi yang semakin mendunia.

A. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Pembahasan tentang pendidikan IPS tidak bisa dilepaskan dari interaksi fungsional perkembangan masyarakat Indonesia dengan sistem dan praksis pendidikannya. Yang dimaksud dengan interaksi fungsional di sini adalah bagaimana perkembangan masyarakat mengimplikasi terhadap tubuh pengetahuan pendidikan IPS, dan sebaliknya bagaimana tubuh pengetahuan pendidikan IPS turut memfasilitasi pengembangan aktor sosial dan warga negara yang cerdas dan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam mengkaji perubahan dalam masyarakat, perlu diawali dengan postulat yang telah diterima secara umum, bahwa dalam kehidupan ini perubahan merupakan suatu keniscayaan karena tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan niscaya terjadi secara terus-menerus. Proses perubahan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berbagai aspek perubahan yang berkaitan erat langsung atau tak langsung dengan pemikiran, sikap, dan

tindakan manusia dalam lingkup global yang memberi konteks terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan manusia Indonesia.

Sebagaimana dapat disimak dari berbagai sumber kepustakaan dan informasi aktual, dewasa ini masyarakat dunia ditengarai oleh berbagai gejala yang menunjukkan sedang terjadinya krisis yang menyeluruh. Keseluruhan krisis itu, seperti dicontohkan oleh Capra (1998:11) berupa: "...angka inflasi yang tinggi dan pengangguran, krisis energi, krisis penanganan kesehatan, polusi dan kerusakan lingkungan, maraknya kejahatan dan kriminalitas", diteorikan sebagai sisi-sisi dari suatu krisis yang sama, yakni "krisis persepsi". Hal ini terjadi, demikian ditegaskannya sebagai akibat dari penerapan konsep-konsep dari "...pandangan dunia yang sudah usang-pandangan dunia mekanistik sains Cartesian dan Newtonian kepada realitas yang memang sudah tidak dapat lagi dipahami dalam konsep-konsep ini". Dikatakan lebih lanjut bahwa "Sekarang kita hidup dalam dunia yang saling berhubungan secara global, di mana fenomena-fenomena biologis, fisik, sosial maupun lingkungan saling ketergantungan. Untuk menjelaskan dunia ini secara memadai kita memerlukan sebuah perspektif ekologis, yang tidak ditemukan dalam pandangan dunia Cartesian". Oleh karena itu, menurut Capra (1998:1) diperlukan adanya "...paradigma baru visi baru tentang realitas; perubahan yang mendasar pada pemikiran, persepsi, dan nilai yang kita miliki [yakni]...pergeseran dari konsepsi mekanistik kepada konsepsi realitas yang holistik".

Untuk memahami semua gejala krisis dalam konteks kehidupan global yang sistemik, diperlukan cara pandang yang utuh dan menyeluruh yang oleh Capra (1998:11) disebut sebagai cara memandang situasi "...dalam konteks evolusi budaya manusia". Dengan merujuk pada teori perubahan "tantangan dan tanggapan" (*challenge and response*) dari Toynebee, yang pada dasarnya meneorikan "Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dari suatu masyarakat, atau kelompok sosial, yang mendorong masyarakat itu untuk memasuki proses peradaban, Capra (1998:13-17) mengemukakan adanya "Irama berulang dalam pertumbuhan budaya", yang pada dasarnya merupakan siklus interaktif antara dua kekuatan yang saling mempengaruhi yang ia ambil dari filsafat Cina, yakni "yin" sebagai lambang dari "kepasifan" dan "yang" sebagai lambang dari "keaktifan". Dua kekuatan ini, demikian lebih lanjut ditegaskan oleh Capra (1998:2936) dapat ditafsirkan sebagai kekuatan "yin" yang bersifat "responsif, konsolidatif, dan kooperatif" atau disebut juga sebagai "ego-

action” yang berkarakter “intuitif, dan kekuatan “yang” yang bersifat agresif, *ekspansif*, dan, *kompetitif* atau disebut juga sebagai *ego-action* yang berkarakter “rasional”. Pemikiran yang responsif, konsolidatif, kooperatif, dan berkarakter intuitif ini cenderung bersifat padu, holistik, dan non linear. Sedangkan pemikiran yang agresif, ekspansif, kompetitif, dan berkarakter rasional cenderung bersifat linear, terfokus, dan analitis, serta terpotong-potong. Atau dengan kata lain Capra (1998:29) menyimpulkan bahwa “pengetahuan rasional” yang dilambangkan dengan kekuatan “yang” itu melahirkan aktivitas yang terpusat pada diri, sedang “kearifan intuitif” yang dilambangkan dengan kekuatan “yin” melahirkan aktivitas ekologis atau sadar lingkungan.

Merujuk pada pandangan Capra (1999) tersebut di atas, dapatlah ditafsirkan bahwa tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan paradigma berpikir ilmiah sehingga kita tidak lagi agresif, ekspansif, dan kompetitif. Akan tetapi, kita juga perlu secara proporsional menggunakan paradigma berwawasan intuitif yang bersifat sintesis, sadar lingkungan, dan holistik sehingga ada interaksi yang harmonis antara kekuatan rasionalitas dan intuitif. Dengan cara itu, memungkinkan kita dapat memilih dengan tepat, untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma berpikir rasional, dan untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma kearifan intuisi. Yang patut dicatat adalah bahwa dalam kehidupan ini selalu terdapat saling ketergantungan, di mana satu persoalan yang timbul tidaklah mungkin berdiri sendiri. Karena itu, cara pandang yang bersifat holistik seyogianya menjadi pola dasar dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Demikian juga dalam menyimak dan menyikapi berbagai kecenderungan dalam masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan masyarakat global.

Dalam memasuki abad ke-21 awal milenium ketiga, Indonesia yang dulu oleh pemerintah Orde Baru dicanangkan sudah bisa tinggal landas, secara mengejutkan justru mengalami krisis dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, ternyata berlanjut ke krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik yang berujung dengan berhentinya Presiden Soeharto dan tampilnya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI ke tiga dengan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai kelengkapan pemerintahannya. Di dalam era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, walaupun berbagai upaya telah mulai dicoba untuk mengatasi berbagai krisis tersebut, ternyata belum dapat

menyentuh semua dimensi krisis tersebut, malahan kemudian berkembang menjadi krisis sosial-budaya, termasuk di dalamnya krisis pendidikan.

Sampai saat ini, tanda-tanda yang signifikan menuju penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas belum cukup menjanjikan karena memang memerlukan waktu. Harapan yang besar seluruh rakyat Indonesia kemudian digantungkan pada pemerintahan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang benar-benar memperoleh legitimasi MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kini, di bawah kepemimpinan presiden yang baru Susilo Bambang Yudoyono, bangsa Indonesia menanamkan harapan besar. Namun demikian, situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sampai saat ini masih tetap diliputi ketidakpastian dengan krisis multidimensional yang terus berkepanjangan. Kehidupan politik dengan sistem multipartai tampak penuh dengan euforia demokrasi yang salah kaprah ternyata berujung pada ketidakserasian hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keadaan itu semua ternyata telah memperparah kehidupan ekonomi yang juga secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan dampak sosial-kultural yang juga penuh dengan ketidakpastian.

Dalam situasi seperti itu, berbagai pertanyaan muncul mengenai prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada abad ke-21 mendatang dalam konteks berbagai kecenderungan global yang ada sebagaimana dapat disimak dari prediksi dan pengamatan para ahli. Berkaitan dengan prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, "Megatrends Asia" sebagaimana diramalkan oleh Naisbitt (1996:xviii-xx) perlu dilihat sebagai latar konteks regional, yang apabila hal itu benar terjadi, akan mewarnai kehidupan masyarakat-bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Kedelapan kecenderungan Asia yang diramalkan akan mengubah dunia itu adalah perubahan-perubahan dari: "Negara Bangsa ke Jaringan; Tuntutan Ekspor ke Tuntutan Konsumen; Pengaruh Barat ke Cara Asia; Kontrol Pemerintah ke Tuntutan Pasar; Desa ke Metropolitan; Padat Karya ke Teknologi Canggih; Dominasi Kaum Pria ke Munculnya Kaum Wanita; dan Barat ke Timur".

Bila ke delapan kecenderungan itu dianalisis dengan cermat, secara konseptual menyiratkan bahwa pada masa yang akan datang ada

kecenderungan bertambah luasnya jaringan kerja sama antarnegara yang berarti meningkatnya pengertian dan mungkin juga konflik kepentingan antarnegara; peningkatan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan konsumen, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan ekonomi; bangkitnya orang-orang Asia, yang berarti meningkatnya tuntutan pengembangan kepercayaan diri atas dasar kemampuan, terjadinya perluasan desentralisasi, yang berarti bertambah luasnya tuntutan partisipasi warga negara dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan; meningkatnya urbanisasi, yang berarti berkembangnya tuntutan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja di perkotaan; semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pendidikan dalam berbagai bidang; bertambah luasnya partisipasi wanita dalam berbagai kegiatan, yang berarti meningkatnya tuntutan pendidikan bagi wanita; dan meluasnya pengaruh pemikiran dan cara kerja Asia di dunia, yang berarti akan semakin terbukanya komunikasi dan kerja sama antarindividu dan organisasi di negara-negara Asia dengan yang berada di negara-negara yang ada di belahan bumi lain.

Bila dilihat secara instrumental, sesungguhnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) No.2/1989 kualitas warga negara Indonesia yang diharapkan dapat dikembangkan itu telah digariskan dengan tegas. Dalam Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan "...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Kemudian dalam pasal 13 ayat (1) mengenai fungsi Pendidikan Dasar juga digariskan dengan tegas bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk "...mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan seterusnya...". Demikian juga dalam Pasal 15 ayat (1) tentang fungsi Pendidikan Menengah dinyatakan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan selain sebagai kelanjutan pendidikan dasar juga berfungsi untuk "...menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi”. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat (1) mengenai fungsi pendidikan tinggi juga ditetapkan bahwa pendidikan tinggi selain sebagai kelanjutan pendidikan menengah juga berfungsi “...menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian”. Malah di dalam Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara mengenai Agama dan Sosial Budaya dikemukakan tentang perlu ditingkatkannya “...kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta moral dan etika luhur masyarakat”.

Yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dan merupakan masalah yang cukup pelik dan multidimensional atau bersegi jamak, adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai instrumental tersebut dalam praksis kehidupan sosial budaya dan pendidikan.

Secara khusus, Soedijarto (1999:12) mempertanyakan mengapa sistem pendidikan yang secara filosofis telah sejalan dengan cita-cita pembangunan bangsa, tetapi dalam kenyataannya belum berhasil melahirkan kinerja sosial yang secara efektif dapat mengatasi berbagai krisis. Jawaban yang diajukan Soedijarto (1999:13-22) adalah bahwa pendidikan yang belum menjadi proses peradaban, tetapi baru berperan sebagai penyajian pengetahuan; yang belum berperan efektif dalam proses sosialisasi dan pembudayaan dalam rangka proses peradaban; kondisi infrastruktur pendidikan yang belum mendukung proses sosialisasi dan pembudayaan; dan proses pembelajaran yang belum penuh tantangan dan belum didukung oleh “...tersedianya tenaga kependidikan yang berjiwa pendidik dan profesional, dengan dukungan sistem evaluasi yang relevan bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku dari manusia Indonesia yang dicita-citakan”.

Apa yang dikemukakan oleh Soedijarto (1999) tersebut memberi gambaran bagaimana tingkat kerumitan perwujudan nilai-nilai instrumental yang mengusung nilai-nilai ideal itu di dalam kenyataannya sebagai nilai praksis. Nilai-nilai yang begitu baik yang diuraikan dalam semua ketentuan perundangan, khususnya perundangan pendidikan pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai ideal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45, yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kelihatannya antara nilai ideal dan nilai instrumental sudah cukup koheren. Mengapa justru ketika sampai

kepada tataran praksis semua nilai yang baik itu tidak bisa terwujudkan sepenuhnya?

Pada tataran ideal, nilai tersebut, dalam hal ini “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan muatannya nilai-nilai Pancasila, sangat abstrak dan universal karena itu lebih konstan. Pada tataran instrumental, penjabaran nilai ideal tersebut relatif lebih mudah dikendalikan karena bersifat normatif dan dikerjakan di atas meja para pembuat perundangan atau lembaga birokratis. Sedangkan nilai praksis bersifat sangat kompleks karena “Nilai praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Sifatnya amat dinamis “...dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dengan realitas, yang tidak sepenuhnya dapat kita kuasai” (Moerdiono, 1995:9). Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa nilai-nilai instrumental tentang kualitas warga negara Indonesia yang baik yang tertuang dalam perundangan pendidikan dan perundangan lainnya belum bisa diwujudkan secara optimal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perwujudan nilai praksis ini adalah kondisi objektif manusia dan lingkungannya, seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada tingkat mikro adalah kondisi objektif dari guru, siswa, para administrator persekolahan, sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semua itu, yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Jika dilihat secara analitik, praksis pendidikan IPS dalam kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia, menunjukkan suatu bidang permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh, dan multidimensional. Di situ ada kontribusi pengalaman sejarah; kondisi objektif alam, sosial, ekonomi, politik, budaya; dan pengaruh dunia luar sebagai dampak dari kehidupan yang semakin mendunia. Oleh karena itu, pendekatan yang perlu digunakan dalam pengkajian pendidikan IPS Indonesia adalah pendekatan holistik, yang menurut Capra (1998) seperti dibahas pada awal bagian ini disebut sebagai pendekatan yang menuntut kearifan intuisi dan bersifat ekologis. Tentu saja kaidah-kaidah keilmuan pada tataran epistemologi harus tetap menjadi rujukan konseptual. Dengan demikian, kajian pendidikan IPS tidak bisa tidak harus merupakan suatu kerangka konseptual sistemik atau *integrated system of knowledge*, seperti digagaskan oleh Hartoonian (1992) atau *synthetic discipline* menurut Somantri (1998), atau *multidimensional* menurut Cogan (1998).

B. DINAMIKA GERAKAN DEMOKRATISASI

Hal lain yang mewarnai perkembangan masyarakat dunia saat ini adalah berkembangnya gerakan demokratisasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Asasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat”. Di lain pihak, Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi adanya 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: “Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan *Rule of Law*, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial” (*cetak tebal* dari penulis). Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (1998). Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan khasnya demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Elpoisito dan Voh,1999:28) disebut *teodemokrasi*, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Huntington (1991) dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* yang diterjemahkan oleh Marjohan (1995) menjadi *Gelombang Demokrasi Ketiga*, membahas bagaimana dinamika pemikiran dan praksis demokrasi sepanjang sejarah. Dalam mengonseptualisasikan demokrasi Huntington (1991) mengacu pada tradisi pemikiran demokrasi dari Schumpeter (1942) yang mengajukan “metode demokratis” dalam arti “...prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan

melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat". Bertolak dari tradisi tersebut Huntington (1991:5) memberikan batasan sistem politik abad ke-20 dinilai demokratis apabila "...para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk leluasa berhak memberikan suara". Dari definisi itu tampak bahwa Huntington (1991) menempatkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi sebagai "esensi demokrasi". Namun demikian, hal itu bukanlah segalanya karena setelah pemilihan umum terbentang tuntutan lainnya, yakni "pengakhiran rezim nondemokratis, penguatan rezim demokratis, dan kemudian pengonsolidasian sistem yang demokratis" (Huntington, 1991:8). Karena itu, pemilihan umum berkala yang jujur dan adil dianggap sebagai syarat minimal dari suatu proses demokrasi. Diingatkannya (Huntington, 1991:8-12) pula bahwa walaupun pemilihan yang jujur dan adil sudah terlaksana perlu diantisipasi berbagai hal, misalnya pemimpin yang terpilih itu tidak sungguh-sungguh menjalankan kekuasaannya dengan baik; adanya kelemahan dari sistem politik yang demokratis; penyikapan terhadap demokrasi dan nondemokrasi sebagai dua hal yang dikotomis atau dua titik dalam satu kontinum; munculnya sikap dari rezim nondemokratis yang tidak mau kompetisi dalam pemilihan umum.

Dari kajian Huntington (1991:12-28) ditemukan bahwa sesungguhnya sistem politik yang demokratis itu telah berkembang secara bergelombang sepanjang sejarah dan bukan hanya ada dalam zaman modern saja. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi modern (Huntington, 1991:13-16), ditegaskan "...bukanlah sekadar demokrasi desa, suku bangsa, atau negara kota; demokrasi modern adalah demokrasi negara-kebangsaan dan kemunculannya berkaitan dengan perkembangan negara kebangsaan".

Secara evolusioner proses demokratisasi di masa modern dikategorikan ke dalam tiga gelombang, yakni "gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926), yang berakar pada revolusi Prancis; gelombang balik pertama (1922-1942), yang ditandai adanya kecenderungan demokrasi yang mengecil dan munculnya rezim otoriter menjelang Perang Dunia II; gelombang pendek demokratisasi kedua (1943-1962), yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa Perang Dunia II; gelombang balik kedua (1958-1975), kembali ke otoriterisme, antara lain

di Amerika Latin; dan gelombang demokratisasi ketiga (1974), yang ditandai dengan munculnya rezim-rezim demokratis menggantikan rezim totaliter di sekitar 30 negara dalam kurun waktu 15-an tahun.

Dalam konteks teori Huntington itu (1991:26-27), pada saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga yang dinilainya sangat spektakuler karena melanda seluruh penjuru dunia. Isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini, antara lain: hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Selain itu, dapat ditambahkan karena proses demokratisasi ini menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik maka penyiapan warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini. Sebagaimana diyakini bahwa etos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu, pendidikan IPS seyogianya menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam arti yang luas karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia.

Sementara itu, pengembangan masyarakat madani Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif dan warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara, yang memungkinkan setiap warga negara dapat belajar demokrasi melalui praktik kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kualitas berkehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin lama semakin meningkat.

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara, mengerti, menghargai kesempatan, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Menurut Gandal dan Finn (1992:3) pendidikan tersebut bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Namun demikian, diingatkannya

bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai subjek yang terisolir yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika, atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan (Gandal dan Finn,1992:4-5) perlu dikembangkannya model pendidikan demokrasi berbasis sekolah (*school-based democracy education*) paling tidak dalam empat alternatif bentuk. *Pertama*, perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. *Kedua*, adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. *Ketiga*, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. *Keempat*, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

C. PARADIGMA PENDIDIKAN IPS DALAM KONTEKS INDONESIA

Perkembangan studi sosial sebagai suatu bidang kajian telah dibahas pada Kegiatan Belajar 1. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana studi sosial pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan “social studies” Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan studi sosial terbaru dari NCSS (1994). Selanjutnya, pada Kegiatan Belajar 2 ini kita akan mencurahkan perhatian untuk membahas mengenai pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia.

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu, seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh *National Council for the Social Studies (NCSS)* sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang.

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. *Pertama* di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS atau SSEC. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana pendidikan IPS Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antaranggota secara insidental. *Kedua* perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur). Pengaruh akademis dari komunitas ilmiah bidang ini terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi, sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi *Social Studies Curriculum Task Force*-nya NCSS, atau SSEC di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa *contents* pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu, yang secara sporadis dapat dijangkau oleh penulis.

Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat penulis telusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawangmangu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut, (Panitia Seminar Nasional Civic Education, 1972:2, dalam Winataputra, 1978:42) ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeable*), yakni “pengetahuan sosial, studi sosial, dan

ilmu pengetahuan sosial” yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam Seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian studi sosial dari Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1937 yang segera dapat respons akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar *Civic Education* di Tawangmangu itu, seperti Achmad Sanusi, Numan Somantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut, digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah studi sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran atau penafsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul “Studi Sosial: Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif” yang isinya diwarnai oleh pemikiran Leonard Kenworthy (1970) dengan bukunya “Teaching Social Studies”.

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga istilah yakni (1) Studi Sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS; (2) Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung, 1973a, 1973b).

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk, yakni (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial, (2) pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi; dan (3) pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus, yang dalam konsep tradisi "*social studies*" termasuk tradisi *citizenship transmission* (Barr, dan kawan-kawan: 1978).

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil, yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmission*; (2) pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu, tetap dipertahankan dalam Kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkan kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984, kedua bahan kajian tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi tradisi *citizenship transmission* dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan *spiral of concept development* ala Taba (Taba: 1967) dan *expanding environment approach* ala Hanna (Dufty: 1970) dengan bertitik tolak dari masing-masing sila Pancasila.

Di dalam Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan (SD, SLTP, SMU). Sedangkan, mata pelajaran IPS diwujudkan dalam: *pertama*, pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d kelas VI; *kedua*, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, dan *ketiga*, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi *in social studies taught as social science* menurut Barr dan kawan-kawan (1978). Di SMU ini, bidang pendidikan IPS terpisah-pisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi di kelas III program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk "...menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antarbangsa di dunia" (Depdikbud, 1993: 23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi "*citizenship transmission*" (Barr, dan kawan-kawan: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif (Depdikbud, 1993: 29). Sedang untuk Program IPS mata pelajaran Ekonomi ini bertujuan untuk "...memberikan bekal kepada siswa mengenal

beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi” (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan ekonomi di SMU, baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi studi sosial yang diajarkan sebagai ilmu sosial (Barr dkk. 1978).

Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan “...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat” (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu, mata pelajaran Geografi memusatkan perhatian pada upaya “...untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Depdikbud, 1993: 30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan “...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan negara RI maupun negara lain” (Depdikbud, 1993: 31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk “...menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini” (Depdikbud, 1993: 31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk “...memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri”, dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk “...menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan

pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat” (Depdikbud, 1993: 33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: *pertama*, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi “citizenship transmission” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; *kedua*, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi ilmu sosial dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS ini, bila dilihat dari kajian konseptual para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang “Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial”, Achmad Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998: 222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang “mengulit-bawang”; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu pula, diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang *fair*. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan *contents* pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah, yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri selaku pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri: 1993) kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut.

“Versi PIPS Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah:

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

“Versi PIPS Untuk HIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP:

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama, yakni PIPS tetapi dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakannya penulis pikir, dalam format sistem pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan, sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun, rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Somantri (1993: 8) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka, Jakarta tahun 1998 (Somantri, 1998: 5-6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari “*position paper*” HISPIPSI tentang disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Somantri selaku Ketua HISPIPSI (Somantri: 1998) *Position Paper* itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai *synthetic discipline* atau menurut Hartonian (1992) sebagai *integrated system of knowledge*. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian, kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep, yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian, masing-masing memiliki jati diri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih.

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif misalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu, Tsauri (1997: 1) yang mengutip pemikiran Affian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang seyogianya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kukuh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni: *Pertama*, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan *kedua*, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu *contents* dalam PDIPS.

PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik pedagogis, yakni: *pertama*, PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan *kedua* PIPS dalam tradisi "ilmu

sosial” (*social science*) dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS terpisah-pisah untuk SMU. Kedua tradisi PIPS tersebut, terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP.

Dalam konteks perkembangan pendidikan studi sosial di Amerika atau “Pendidikan IPS” di Indonesia konsep dan praksis pendidikan demokrasi yang dikemas sebagai “*citizenship education*” atau “Pendidikan Kewarganegaraan” berkedudukan sebagai salah satu dimensi dari tujuan, *contents* dan proses studi sosial atau “pendidikan IPS”, atau dapat juga dikatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran studi sosial atau “pendidikan IPS”. Walaupun demikian, subsistem pendidikan demokrasi ini sejak awal perkembangannya, seperti di Amerika sudah menunjukkan keunikan dan kemandiriannya sebagai program pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik. Subsistem ini, sejalan dengan perkembangan konsep dan praksis demokrasi, terus berkembang sebagai suatu bidang kajian dan program pendidikan yang dikenal dengan *citizenship education* atau *civic education*, atau untuk Indonesia dikenal dalam label yang berubah-ubah mulai dari *Civics*, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Jika dikaji dengan cermat dalam konteks perkembangan studi sosial ternyata pendidikan kewarganegaraan yang pada dasarnya berintikan pengembangan warga negara agar mampu hidup secara demokratis merupakan bagian yang sangat penting dalam studi sosial. Hal itu dapat disimak sejak studi sosial mulai diwacanakan tahun 1937 oleh Edgar Bruce Wesley, yang definisinya tentang studi sosial dianggap sebagai pilar epistemologis pertama, sampai dengan munculnya paradigma studi sosial dari NCSS tahun 1994. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa esensi pendidikan demokrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari studi sosial.

Bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk kemasan “*Citizenship education*” maupun “*Civic Education*” atau pendidikan kewarganegaraan ini, kini kelihatan semakin banyak dikembangkan, baik di

negara demokrasi yang sudah maju maupun negara yang sedang merintis atau meningkatkan diri ke arah itu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi yang kini telah menjadi gerakan sosial-politik dan sosial-budaya yang mendunia.

Menyimak perkembangan studi sosial secara umum dan Pendidikan IPS di Indonesia sampai saat ini maka perlu adanya reorientasi pendidikan IPS sebagai berikut.

1. Menegaskan kembali visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan individu siswa sebagai "*aktor sosial*" yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai "*warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan partisipatif*".
2. Menegaskan kembali misi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep, prinsip dan metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmuan lain untuk mengembangkan karakter aktor sosial dan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.
3. memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan yang diwadahi oleh mata pelajaran Kewarganegaraan dan sebagai pendidikan sosial yang diwadahi oleh mata pelajaran IPS terpadu dan mata pelajaran IPS terpisah.
4. Menata kembali sarana programatik pendidikan IPS untuk berbagai jenjang pendidikan (Kurikulum, Satuan Pelajaran, dan Buku Teks) sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS.
5. Menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS sehingga dapat dihasilkan calon guru dan guru pendidikan IPS yang profesional.